



ANALISIS KELEMBAGAAN AGRIBISNIS PADI SAWAH DI NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ANALYSIS OF RICE SAWAH AGRIBUSINESS IN NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ivonne Ayesha¹, Agus Rizal², Herda Gusvita³

¹Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung

²Program Studi Agribisnis, Universitas Ekasakti

E-mail: drivonneayesha@gmail.com

INFO ARTIKEL

Koresponden

Ivonne Ayesha

drivonneayesha@gmail.com

Agus Rizal

Herda Gusvita

herda.gusvita@yahoo.com

Kata kunci:

kelembagaan, kemitraan, agribisnis, usahatani, padi sawah

Website:

<http://idm.or.id/JSCR>

hal: 7 - 17

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelembagaan agribisnis padi sawah dan untuk mengetahui bentuk kemitraan serta peran kelembagaan dalam mendukung perkembangan agribisnis tersebut di Nagari Lubuk Pandan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa A. Kelembagaan pada agribisnis padi sawah, teridentifikasi yaitu: 1. Subsistem hulu: GAPOKTAN, penyedia input, kios saprodi, tetangga dan saudara, 2) Subsistem usahatani: penyedia tenaga kerja. 3) Subsistem hilir: penggilingan padi (RMU). 4) Subsistem pemasaran: pengumpul. 5) Subsistem penunjang: penyedia modal. B) Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan agribisnis padi sawah di Nagari Lubuk Pandan adalah: a) Bentuk Kemitraan yang terjadi antara Gapoktan dengan pemberian pupuk pemerintah; Gapoktan harus terorganisasi dengan jelas; petani harus mempunyai lahan yang tergabung di dalam Gapoktan; petani harus menjemput langsung pupuk atau benih yang telah disediakan oleh pemerintah. Bentuk kemitraan kios saprodi dengan petani dengan kesepakatan; 1) petani membayar/membeli input dengan sistem bayar tunai; 2) petani harus menjemput langsung pupuk yang dibelikan ke kios saprodi. Bentuk kemitraan yang terjadi dengan lembaga input produksi lainnya menimbulkan kesepakatan, yaitu: 1) benih yang ditukar yaitu dalam varietas yang berbeda; 2) benih/gabah yang ditukar yaitu gabah yang telah di jemur atau gabah kering; 3) apabila petani mendapatkan benih dengan sistem meminjam, benih di kembalikan setelah panen. Peran subsistem hulu: menghasilkan barang-barang modal bagi proses produksi. b) Bentuk kemitraan petani dengan buruh tani menimbulkan kesepakatan yaitu: 1) upah yang diterima buruh tani laki-laki yaitu Rp.70.000/hari dan wanita Rp.60.000/hari; 2) upah tersebut di bayar langsung tunai kepada buruh tani apabila pekerjaan telah selesai; 3) ketentuan kerja yaitu mulai dari pencabutan benih sampai selesai penanaman. Peran subsistem usahatani adalah melakukan kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas padi. c.) Bentuk kemitraan petani padi sawah dengan pemilik penggilingan padi (RMU) menimbulkan kesepakatan yaitu; 1) padi/gabah yang digiling yaitu dalam bentuk gabah kering atau gabah yang telah di jemur; 2) upah yang diberikan petani ke penggilingan yaitu 1 (satu) belek beras, upahnya 2 liter beras; 3) pengilingan datang langsung ke rumah petani untuk menggiling padi di jadikan beras. Peran dari penggilingan padi (RMU) adalah ketika pasca panen yaitu mengolah padi/gabah untuk di jadikan beras. d)Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan pada subsistem pemasaran menimbulkan kesepakatan, yaitu: 1) pengumpul datang langsung ke sawah untuk membeli padi/gabah; 2) apabila petani meminjam modal terlebih dahulu ke pengumpul petani harus menjual padinya ke pengumpul tempat meminjam modal tersebut; 3) agen/pengumpul yang membelikan padi ke petani yaitu dengan sistem bayar tunai. Peran subsistem pemasaran adalah melakukan kegiatan pemasaran produk padi/gabah sampai ke pengumpul. e) Pinjaman modal yang diberikan pemilik penggilingan padi ke petani dengan bentuk kemitraan yang terjadi, adalah: 1) apabila panen nanti padi atau hasil panen di jual ke pemilik Penggilingan; 2) padi/gabah dijemput langsung oleh pemilik Penggilingan; 3) apabila petani meminjam uang atau pupuk petani harus menjemput sendiri ke tempat penggilingan. Peran dari lembaga penyedia modal adalah menyediakan modal bagi petani untuk melakukan usahatani padi sawah.

Copyright © 2020 JSCR. All rights reserved.

ARTICLE INFO**Correspondent:**

Ivonne Ayesha
drivonneayasha@gmail.com

Agus Rizal

Herda Gusvita
herda.gusvita@yahoo.com

Key words:

*institutions, partnerships,
agribusiness, farming,
lowland rice*

Website:

<http://idm.or.id/JSCR>

page: 7 - 17

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze lowland rice agribusiness institutions and to determine the forms of partnerships and institutional roles in supporting the development of agribusiness in Lubuk Pandan Village. This research uses qualitative research. The research was conducted in Nagari Lubuk Pandan, 2x11 Enam Lingkungan District, Padang Pariaman Regency. The results showed that A. Institutionalization in lowland rice agribusiness, were identified, namely: 1. Upstream subsystem: GAPOKTAN, input providers, input production kiosks, neighbors and relatives, 2) Farming subsystem: labor provider. 3) Downstream subsystem: rice mills (RMU). 4) Marketing subsystem: collectors. 5) Support subsystem: providers of capital. B) Forms of partnership and institutional role of lowland rice agribusiness in Nagari Lubuk Pandan are: a) Forms of partnership that occur between Gapoktan and government fertilizer; Gapoktan must be clearly organized; farmers must own land that is incorporated in Gapoktan; farmers must pick up fertilizers or seeds directly provided by the government. Form a partnership with input production kiosks with farmers by agreement; 1) farmers pay / buy inputs using a cash payment system; 2) farmers must pick up the fertilizers directly from the production input kiosk. Forms of partnerships that occur with other production input institutions have resulted in agreements, namely: 1) exchanged seeds, namely in different varieties; 2) seeds / grain exchanged, namely grain that has been dried in the sun or unhulled; 3) if the farmer gets the seed with a borrowing system, the seed is returned after harvest. The role of the upstream subsystem: to produce capital goods for the production process. b) The form of partnership between farmers and farm laborers results in agreements, namely: 1) the wages received by male farm workers are Rp. 70,000 / day and women Rp. 60,000 / day; 2) the wages are paid directly in cash to the farm workers when the work has been completed; 3) working conditions, namely starting from removing the seeds to completion of planting. The role of the farming subsystem is to carry out activities that use capital goods and natural resources to produce rice commodities. c.) The form of partnership between lowland rice farmers and rice mill owners (RMU) resulted in an agreement, namely; 1) rice / unhulled rice, namely in the form of dry grain or unhulled rice that has been dried in the sun; 2) the wages given by farmers to the mill, namely 1 (one) belek of rice, the wages are 2 liters of rice; 3) The mill comes directly to the farmer's house to grind the rice into rice. The role of the rice mill (RMU) is during post-harvest, which is processing rice / unhulled rice into rice. d) Forms of partnerships and institutional roles in the marketing subsystem lead to agreements, namely: 1) collectors come directly to the fields to buy rice / unhulled rice; 2) if the farmer first borrows capital from the farmer, the farmer must sell his rice to the collector where the capital is borrowed; 3) agents / collectors who buy rice to farmers using the cash payment system. The role of the marketing subsystem is to carry out marketing activities for rice / grain products to collectors. e) Capital loans provided by rice mill owners to farmers in the form of partnerships that occur are: 1) if the rice harvest is later sold or the harvest is sold to the mill owner; 2) rice / grain is picked up directly by the mill owner; 3) If the farmer borrows money or fertilizer, the farmer has to pick it up himself to the mill. The role of the capital provider institution is to provide capital for farmers to carry out lowland rice farming.

Copyright © 2020 JSCR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Peran kelembagaan petani dalam mendukung sistem agribisnis sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan pertanian padi sawah. Bagi sebagian besar wilayah, eksistensi kelembagaan pertanian dan petani belum terlihat perannya, padahal fungsinya sangat beragam, antara lain sebagai penggerak, penghimpun, penyalur sarana produksi, pembangkit minat dan sikap (Rizqul, 2011). Konsekuensi logis dalam melaksanakan pembangunan pertanian adalah mendorong inovasi kelembagaan dengan keahlian yang meliputi pengetahuan pasar, agribisnis dan keuangan

pedesaan (Adekunle *et al*, 2012). Oleh sebab itu kajian kelembagaan sangat diperlukan agar kondisi yang sebenarnya dapat diketahui secara mendalam dan dapat menentukan langkah perbaikan jika masih terdapat kelemahan dalam kelembagaan tersebut guna kemajuan agribisnis yang dijalankan.

Setiap sistem agribisnis memiliki kelembagaan sesuai dengan karakteristik komoditasnya, demikian juga halnya dengan sistem agribisnis padi sawah di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Secara umum kelembagaan agribisnis padi di wilayah ini sama dengan wilayah lainnya, yaitu kelembagaan pada subsistem hulu sampai subsistem hilir. Meskipun demikian tiap-tiap daerah memiliki kekhasan dalam menjalani sistem agribisnisnya. Kekhasan masing-masing daerah tersebut dikenal dengan kearifan lokal. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kelembagaan agribisnis petani padi sawah yang ada di Nagari Lubuk Pandan, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kemitraan dan peran kelembagaan dalam mendukung perkembangan agribisnis padi sawah di Nagari Lubuk Pandan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Nagari Lubuk Pandan, Kec. 2x11 Enam Lingkung, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*). Penelitian ini berbentuk kualitatif. Sumber data adalah: petani, ketua kelompok tani, PPL, pemuka masyarakat, pedagang pupuk, pemilik penggilingan padi, data juga diperoleh dari pemuka masyarakat yang dianggap dapat memberikan informasi terkait topik penelitian ini.

Dalam menetapkan responden menggunakan teknik *snowball sampling*. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel/responden. Pemilihan key-informan dilakukan secara terarah (*purposeful sampling technique*) dengan penekanan pada sumber informasi kunci, yaitu: tokoh kunci dan lembaga formal, informal atau non-formal di lokasi penelitian.

Analisis kelembagaan difokuskan pada pola, aturan main (*rule of the game*) yang dijalankan serta pola interaksi antar lembaga yang bermitra. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Analisis Kelembagaan Agribisnis Padi Sawah

Kelembagaan merupakan basis terbentuknya modal sosial yang dapat memfasilitasi kerja sama dalam aktivitas agribisnis padi sawah. Modal sosial petani yang meliputi jaringan kerjasama, saling percaya dalam kerjasama, dan norma kerjasama dalam sistem pertanian padi sawah akan mempengaruhi keberhasilan agribisnis tersebut. Menurut Saragih (2001) subsistem dalam agribisnis padi sawah, yaitu meliputi: 1) Kelembagaan pada subsistem hulu, 2) Kelembagaan pada subsistem usahatani, 3) Kelembagaan pada subsistem hilir, 4) Kelembagaan pada subsistem pemasaran, 5) Kelembagaan pada subsistem penunjang. Kelembagaan agribisnis padi di Nagari Lubuk Pandan dikelompokkan berdasarkan subsistem agribisnis yang dikemukakan oleh Saragih (2001) tersebut.

1. Kelembagaan Pada Subsistem Hulu

Menurut Wijaya (2009), subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*) adalah kegiatan ekonomi yang menyediakan sarana produksi bagi pertanian, seperti industri dan perdagangan agrokimia (pupuk, pestisida, dll), industri agro

otomotif (mesin dan peralatan), dan industri benih/bibit. Pada umumnya kelembagaan pada subsistem hulu yaitu terdiri dari: 1) Produk Saprodi, 2) Penyalur Saprodi, dan 3) Asosiasi.

Kelembagaan penyedia input produksi (subsistem hulu) di Nagari Lubuk Pandan, ditemui dalam bentuk kelembagaan formal dan kelembagaan informal. Kelembagaan formal yang ditemui adalah Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) "Lubuk Pandan Sejahtera" dan Kios Saprodi, sedangkan kelembagaan informal seperti kerjasama dengan tetangga dan saudara.

a. Gapoktan Lubuk Pandan Sejahtera belum berkembang dengan baik, hanya berperan sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Gapoktan ini belum memiliki program yang jelas dan terarah untuk mengembangkan usaha padi sawah di wilayah ini. Gapoktan ini merupakan gabungan dari 17 kelompok tani yang ada di Nagari Lubuk Pandan, diresmikan pada Tahun 2009, yang diketuai oleh Bapak Afrizal Yusuf dan Bapak Mukhlis Arif sebagai sekretaris. Bendahara Gapoktan dipercayakan kepada Ibu Deswati.

b. Kios Saprodi

Kios Saprodi merupakan kios yang menyediakan input dan sarana produksi untuk pertanian. Di Nagari Lubuk Pandan terdapat satu kios saprodi yang berlokasi di Korong Balai Satu, sekitar 1 Km dari Jalan Raya Padang-Bukittinggi. Kios Saprodi ini milik Ibu Emi, dan beroperasi setiap hari. Kios Saprodi ini menjual berbagai macam pupuk yaitu Pupuk Urea, Pupuk Zet A, Pupuk TSP, Pupuk Kandang kuda, Pupuk NPK, Pupuk KCl dan berbagai macam obat serta pestisida. Semua input produksi ini diperoleh atau dipasok dari Nagari Pakandangan.

Menurut Rahmat (2011) kios sarana produksi pertanian adalah suatu unit bangunan usaha yang digunakan untuk menyediakan dan menyalurkan sarana produksi pertanian seperti benih/bibit, pupuk, pestisida/herbisida dan sarana pertanian lainnya, untuk mendukung peningkatan produksi dalam upaya penyediaan pangan dan pengembangan agribisnis.

c. Kelembagaan Input Produksi Lainnya

Tetangga termasuk ke dalam lembaga informal penyedia input. Input produksi yang biasanya dapat diperoleh dari tetangga adalah benih/bibit padi. Munculnya tetangga sebagai lembaga penyedia input benih padi di Nagari Lubuk Pandan disebabkan banyak benih padi yang tersedia di kios saprodi tidak sesuai dengan keinginan petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petani yaitu Bapak Abdul Muis mengungkapkan bahwa.

" Kami sudah terbiasa mendapatkan benih dari tetangga dengan cara menukar benih tersebut dengan padi biasa. Di samping bisa mendapatkan benih sesuai dengan keinginan, kami juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli benih".

Di samping itu, saudara/kerabat termasuk dalam kelembagaan hulu, karena ikut terlibat dalam mendukung usahatani padi sawah di Nagari Lubuk Pandan. Biasanya dalam penyediaan lahan untuk digarap oleh saudaranya.

2. Kelembagaan Pada Subsistem Usahatani

Kelembagaan pada subsistem usahatani bertujuan untuk menghasilkan produk primer pertanian yang merupakan bahan baku bagi subsistem agribisnis hilir. Pada kelembagaan ini produk primer yang dihasilkan adalah padi/gabah yang

akan diproses lebih lanjut menjadi beras pada subsistem agribisnis hilir. Menurut Mosher (1986) subsistem usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tumbuhan tanah dan air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan di atas tanah itu, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut dan sebagainya. Pelaku pada kelembagaan subsistem usahatani umumnya terdiri dari: 1) Rumah tangga petani, 2) Kelompok Petani, 3) Perusahaan Budidaya.

3. Kelembagaan Pada Subsistem Hilir

Kelembagaan pada subsistem hilir bertujuan untuk menghasilkan produk agroindustri yang mempunyai nilai tambah yaitu mengolah padi/gabah untuk di jadikan beras. Menurut (Wijaya, 2009) subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) adalah berupa kegiatan ekonomi yang mengolah produk pertanian primer menjadi produk olahan, baik produk antara maupun produk akhir, beserta kegiatan perdagangan di pasar domestik maupun di pasar internasional.

4. Kelembagaan Pada Subsistem Pemasaran

Di Nagari Lubuk Pandan kelembagaan pada subsistem pemasaran yang ditemui adalah berupa pengumpul, lembaga ini termasuk kelembagaan informal. Pengumpul merupakan pelaku agribisnis padi yang membeli gabah langsung ke petani. Agen/pengumpul tersebut datang langsung ke sawah untuk membeli gabah. Pengumpul banyak di jumpai pada musim panen. Biasanya pengumpul ini berasal dari Nagari Lubuk Pandan, Nagari Sungai Asam, dan Nagari Sicincin.

Pengumpul tersebut mampu membeli padi/gabah dalam jumlah yang banyak. Pasar atau pemasaran yang seperti ini disebut juga pasar monopsoni. Dimana Pasar monopsoni adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas (Boediono, 2000).

5. Kelembagaan Pada Subsistem Penunjang

Subsistem penunjang agribisnis (kelembagaan) atau *supporting institution* adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem usahatani, subsistem hilir, dan subsistem pemasaran. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluh pertanian dan lembaga penyediaan modal (Maulidah, 2012).

Subsistem penunjang juga terdiri dari penyuluh pertanian dan penyediaan modal, lembaga ini termasuk kelembagaan formal dan informal. Penyedia modal merupakan orang pemilik penggilingan padi (RMU). Salah satu penyediaan modal yang lazim bernitra dengan petani adalah Bapak Suwardi yang berlokasi di Korong Kiambang. Lembaga pinjaman modal ini memberikan sejumlah uang ke petani pada awal musim tanam dalam bentuk tunai dan barang. Dalam bentuk barang berupa pupuk Urea, TSP, KCL. Pinjaman modal ini dibayar dalam bentuk hasil panen, pada saat tiba musim panen.

Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Agribisnis Padi Sawah

1. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Hulu

Kelembagaan pada subsistem hulu di Nagari Lubuk Pandan terdiri dari Lembaga Gapoktan, Kios saprodi, dan kelembagaan input produksi. Gapoktan menyediakan pupuk bersubsidi untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk. Direktorat Pengembangan Usaha, Departemen Pertanian (2002), menyebutkan, bahwa bentuk kemitraan seperti ini termasuk ke dalam bentuk kemitraan kerjasama

operasional agribisnis (KOA), di mana kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya/sarana untuk mengusahakan/membudidayakan suatu komoditi pertanian.

Bentuk kemitraan kios saprodi dengan petani melalui kesepakatan yang tidak tertulis, yaitu; 1) petani membayar/membeli input dengan sistem bayar tunai; 2) petani harus menjemput langsung pupuk yang dibelikan ke kios saprodi. Menurut Direktorat Pembangunan Usaha, Departemen Pertanian (2002) bentuk kemitraan yang seperti ini termasuk kedalam bentuk kemitraan dagang umum, dimana hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra.

Kelembagaan agribisnis hulu lainnya dalam penyedia input adalah saudara/kerabat petani tersebut. Kemitraan yang terjadi adalah dalam hal penyediaan input lahan. Aturan yang disepakati antara petani dengan saudara atau kerabat yang menyediakan lahan adalah dalam hal bagi hasil usahatani yaitu sebagai berikut: 1) Sistem bagi hasil "bapatigo", yaitu pembagian hasil panen menjadi bagian. Satu bagian untuk petani penggarap dan 2 (dua) bagian untuk pemilik lahan, 2) Semua biaya usahatani ditanggung oleh pemilik lahan, tetapi tenaga kerja dalam keluarga petani tidak dibayarkan upahnya.

2. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Usahatani

Bentuk kemitraan pada subsistem usahatani dikelompokkan menjadi kemitraan dengan buruh tani, dan rumah tangga petani. Munculnya buruh tani ini di karenakan petani tidak mampu bekerja sendiri di lahan sawah sehingga harus menggunakan tenaga orang lain/buruh tani. Aturan main dalam kemitraan yang terjadi antara petani dengan buruh tani yaitu:

- a. Upah yang diterima buruh tani laki-laki yaitu Rp.70.000/hari dan wanita Rp.60.000/hari
- b. Upah tersebut di bayar langsung atau di bayar tunai kepada buruh tani apabila pekerjaan sudah selesai
- c. Ketentuan kerja mulai dari pencabutan benih sampai selesai penanaman, dengan ketentuan jam kerja yaitu dari pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Untuk pengolahan lahan sawah, petani mengupahkannya ke tukang membajak sawah, menggunakan *handtractor*. Aturan atau kesepakatan sebagai berikut:

- a. Apabila buruh tani bekerja membajak dalam bentuk bajak piring, besarnya upah yang dibayarkan adalah Rp.600.000/Ha/3 piring¹ sawah.
- b. Apabila buruh tani bekerja dengan membajak seperti garu piring yaitu dengan upah Rp.500.000/Ha
- c. Upah di bayar apabila pekerjaan telah selesai.

Menurut Direktorat Pengembangan Usaha, Departemen Pertanian (2002) bahwa bentuk kemitraan seperti ini termasuk pada kemitraan sub kontrak. Dalam hal ini mitra menyediakan tenaga kerja kepada petani, sedangkan kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan mitra sebagai bagian dari produksinya.

Kemitraan dengan rumah tangga adalah berupa penggunaan tenaga kerja dalam rumah tangga, terdiri dari yaitu anak, istri dan menantu. Tidak ada pengaturan jam kerja untuk tenaga kerja rumah tangga ini, namun mereka selalu bersedia untuk melakukan pekerjaan usahatani, kecuali anak yang masih dalam usia sekolah, akan membantu bekerja di sawah setelah pulang sekolah. Jenis pekerjaan yang dilakukan

¹ Piring adalah satuan luas sawah masyarakat Nagari Lubuk Pandan. 1 piring= 1/3 Ha

hampir mencakup semua tahapan proses usahatani padi. Tidak ada sistem pengupahan dalam penggunaan tenaga kerja dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tohir (1983) bahwa tenaga kerja yang berasal dari keluarga petani merupakan sumbangan keluarga pada produksi pertanian secara keseluruhan dan tidak pernah dinilai dengan uang.

3. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Hilir

Kemitraan ini terjadi antara petani dengan penggilingan. Bentuk kemitraan yang terjadi antara petani dengan penggilingan padi keliling di Nagari Lubuk Pandan dan aturan yang di sepakati adalah sebagai berikut:

- a. Padi/gabah yang akan digiling sudah dalam bentuk padi kering giling atau gabah yang telah di jemur (bukan padi yang baru di panen).
- b. Besarnya upah yang diberikan petani ke penggilingan yaitu 1 (satu) belek padi upahnya 2 liter beras. Beras sebagai upah penggilingan tersebut langsung diambil oleh pemilik penggilingan ketika proses penggilingan telah selesai.
- c. Penggilingan datang langsung ke rumah petani dan menawarkan jasa penggilingan ke petani, jika petani memiliki padi untuk digiling, maka padi tersebut diserahkan kepemilik penggilingan keliling. Proses penggilingan terjadi di pekarangan rumah petani atau di pinggir jalan yang dekat dengan rumah petani.

4. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Pemasaran

Kemitraan dengan subsistem pemasaran terjadi antara petani dengan pengumpul:

- a. Agen/pengumpul datang langsung ke sawah untuk membeli padi/gabah. Biasanya agen/pengumpul tersebut akan bertanya ke petani, tentang jumlah padi yang akan di jual dan melihat kualitas padi, guna menentukan harga.
- b. Apabila petani meminjam modal terlebih dahulu ke agen/pengumpul petani harus menjual padinya ke agen/pengumpul tempat meminjam modal tersebut. Harga jual padi pada kondisi ini ditetapkan oleh agen/pengumpul. Artinya petani tidak dapat menentukan harga padinya sendiri
- c. Agen/pengumpul yang membeli padi ke petani dengan sistem bayar tunai. Pembayaran biasanya langsung dilakukan di sawah.

5. Bentuk Kemitraan dan Peran Kelembagaan Pada Subsistem Penunjang

Pada subsistem ini petani bermitra dengan penyedia modal, yaitu pemilik penggilingan (RMU), dengan aturan sebagai berikut:

- a. Petani harus menjual hasil panen nya ke pemilik penggilingan (RMU) yang telah meminjamkan uang (modal).
- b. Padi/gabah yang akan dijual dijemput langsung oleh pemilik Penggilingan (RMU) ke sawah petani.
- c. Uang pinjaman harus dijemput oleh petani ke tempat pemilik penggilingan

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petani yaitu Bapak Aswadi meminjamkan uang ke pemilik penggilingan padi sebelum dia melakukan usahatannya yaitu sebesar Rp.1000.000, sedangkan hasil panen padi nya yaitu 100 belek, dia menjual semua hasil panen nya ke pemilik penggilingan padi tempat dia meminjam modal dengan harga Rp.105.000/belek. Artinya pinjaman yang dilakukan oleh petani, dikenakan bunga pinjaman oleh pemilik penggilingan sebesar 5% yang dibayar sekaligus saat panen.

Uang yang diperoleh bapak Aswadi setelah hasil penjualannya yaitu sebesar Rp.9.500.000. Sedangkan harga pasaran gabah di Nagari Lubuk Pandan yaitu sebesar Rp.115.000/belek, oleh karena itu petani tidak bisa menikmati harga pasar yang

sebenarnya, karena petani telah terikat perjanjian dengan pemilik penggilingan padi atas modal yang dipinjamkan tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik penggilingan yaitu: a) Modal dikembalikan dalam bentuk gabah/padi tepat pada saat panen dengan ditambah bunga pinjaman yang juga dalam bentuk padi/gabah; b) Terjaminnya pasokan bahan baku (padi), sehingga pemilik penggilingan dalam terus menjalankan usaha penggilingannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kelembagaan pada agribisnis padi sawah yang teridentifikasi yaitu:

1. Kelembagaan pada subsistem hulu berupa kelembagaan petani (GAPOKTAN), kelembagaan penyedia input, berupa kios saprodi, tetangga dan saudara
2. Kelembagaan pada subsistem usahatani, berupa kelembagaan penyedia tenaga kerja, seperti buruh tani dan rumah tangga petani.
3. Kelembagaan subsistem hilir, yaitu kelembagaan penyedia jasa pasca panen, berupa penggilingan padi (RMU)
4. Kelembagaan pada subsistem pemasaran, yang terdiri dari pengumpul.
5. Kelembagaan pada subsistem penunjang, berupa penyediaan modal usahatani.

Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan agribisnis padi sawah di Nagari Lubuk Pandan adalah:

1. Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan pada subsistem hulu, antara Gapoktan dengan pemberian pupuk pemerintah 1) Gapoktan harus terorganisasi dengan jelas; 2) petani harus mempunyai lahan yang tergabung di dalam Gapoktan; 3) petani harus menjemput langsung pupuk atau benih yang telah disediakan oleh pemerintah. Bentuk kemitraan kios saprodi dengan petani menimbulkan kesepakatan yaitu: 1) petani membayar/membeli input dengan sistem bayar tunai; 2) petani harus menjemput langsung pupuk ke kios saprodi. Bentuk kemitraan yang terjadi dengan lembaga input produksi lainnya menimbulkan kesepakatan, yaitu: 1) benih yang ditukar yaitu dalam varietas yang berbeda; 2) benih/gabah yang ditukar yaitu gabah yang telah di jemur atau gabah kering; 3) apabila petani mendapatkan benih dengan sistem meminjam, benih di kembalikan setelah panen. Peran subsistem hulu: menghasilkan barang-barang modal bagi proses produksi pertanian yaitu perbenihan/pembibitan, pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian.
- b. Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan pada subsistem usahatani, antara petani dengan buruh tani menimbulkan kesepakatan yaitu: 1) upah buruh tani laki-laki yaitu Rp.70.000/hari dan wanita Rp.60.000/hari; 2) upah di bayar tunai apabila pekerjaan telah selesai; 3) pekerjaan dari pencabutan benih sampai penanaman. Peran subsistem usahatani adalah melakukan kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas pertanian primer yaitu padi.
- c. Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan pada subsistem hilir, antara petani padi sawah dengan pemilik penggilingan padi (RMU) menimbulkan kesepakatan yaitu: 1) padi yang digiling dalam bentuk gabah kering; 2) upah yang diberikan petani ke penggilingan yaitu 1 (satu) belek beras, upahnya 2 liter beras; 3) penggilingan datang langsung ke rumah petani. Peran dari penggilingan padi (RMU) adalah ketika pasca panen yaitu mengolah padi/gabah untuk di jadikan beras.
- d. Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan pada subsistem pemasaran, antara pengumpul dengan petani menimbulkan kesepakatan, yaitu: 1) pengumpul

datang langsung ke sawah untuk membeli padi; 2) apabila petani meminjam modal terlebih dahulu ke pengumpul petani harus menjual padinya ke pengumpul tersebut; 3) pengumpul membeli padi ke petani dengan bayar tunai. Peran subsistem pemasaran adalah melakukan kegiatan pemasaran produk padi/gabah sampai ke agen/pengumpul.

- e. Bentuk kemitraan dan peran kelembagaan pada subsistem penunjang. Pinjaman modal yang diberikan pemilik penggilingan padi ke petani dengan bentuk kemitraan yang terjadi, adalah: 1) apabila panen padi di jual ke pemilik penggilingan; 2) padi dijemput langsung oleh pemilik penggilingan; 3) apabila petani meminjam uang atau pupuk harus menjemput ke tempat penggilingan. Peran dari lembaga penyedia modal adalah menyediakan modal bagi petani untuk melakukan usahatani padi sawah.

Saran

1. Untuk kelembagaan yang ada di Nagari Lubuk Pandan baik itu kelembagaan formal maupun kelembagaan informal supaya berperan aktif dalam usaha pengembangan agribisnis padi sawah.
2. Kelembagaan penunjang untuk mendapatkan modal bagi petani dalam melaksanakan usaha padi sawahnya, disarankan kepada petani memiliki koperasi. Kelembagaan penunjang yang ada saat ini RMU (Penggilingan tetap) belum maksimal memberikan modal kepada petani, hal ini di karenakan keterbatasan modal yang dimiliki oleh RMU (Penggilingan).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Wali Nagari Lubuk Pandan, PPL, seluruh responden yang sudah banyak membantu dalam memberikan informasi untuk melengkapi data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adekunle, AA, J Ellis-Jones, I Ajibefun, RA Nyikal, S Bangali, O Fatunbi and AAnge. 2012. *Agricultural innovation in sub-Saharan Africa: Experiences from Multiple-stakeholder Approaches*. Ghana: Forum for Agricultural Research in Africa (FARA), Accra.
- Boediono. 2000. *Ekonomi Mikro*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Direktorat Pengembangan Usaha Deptan. 2002. *Pedoman Kemitraan Usaha Agribisnis*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Mosher. 1986. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Edisi Keempat. LP3ES. Jakarta
- Rizqul, Ahmad. K., 2011. *Perhitungan Ekonomi Usaha tani Padi Organik di Kelompok Tani Jaya, Susukan, Banyumas. Disampaikan pada kegiatan penyuluhan kelompok tani Jaya II dalam rangka Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Susukan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas*. Diakses melalui http://www.academia.edu/2713986/Perhitungan_Ekonomi_Usahatani_Padi_Organik_Di_Kelompok_Tani_Jaya.
- Saragih, B. 2001. *Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian (kumpulan pemikiran)*. PT. Loji Grafika Griya Sarana. Bogor
- Tohir.1983. *Analisis Sistem Usahatani Padi Organik*. Skripsi. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Wijaya, 2009. *Perencanaan Nasional Dalam Pengembangan Agribisnis Di Indonesia*, Pangan No. 24 Vol V, 2009, Jakarta.